

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

CICI PURNIASARI

B 200 120 295

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

CICI PURNIASARI

B 200 120 295

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, Ak., M. Si.

NIK : 195803091957031524

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)


Yang ditulis oleh:

CICI PURNIASARI

B 200 120 295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari sabtu, 30 April 2016
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, Ak., M.Si. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, Ak., MA ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dra. Rina Trisnawati, Ak. M. Si., Ph.D ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE. M.Si.)

NIK : 195803091957031642



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp
(0271)717417 Surakarta-57102

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CICI PURNIASARI**

NIRM : **11.6.106.02030.50295**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Judul skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 2 Mei 2016

Yang membuat pernyataan

(CICI PURNIASARI)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)**

CICI PURNIASARI
B200120295

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail:

cici.purnia@ gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kelemahan pengendalian internal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2013-2014. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel penelitian adalah 60 kabupaten dan kota. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Di sisi lain, variabel lain dalam penelitian ini seperti ukuran, pendapatan asli daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Kata Kunci: ukuran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kelemahan pengendalian internal.

Abstract

The purpose of this study examines of the size, economy growth, locally-generated revenue, and capital expenditures of the local government to internal control weaknesses. The population in this study is the city and regency of Central Java province in period 2013-2014. Based on method purposive sampling, research sample total is 60 city and regency. Hypothesis in this research are tested by multiple linear regression analysis. The results of the research indicate economy growth have significantly effect on internal control weaknesses. On the other hand, other variables such as size, locally-generated revenue, and the capital expenditures have no effect on internal control weaknesses.

Keywords: *internal control weaknesses, size, economic growth, locally-generated revenue, and capital expenditures.*

A. PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah (Martani dan Zaelani, 2011).

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap *assets* dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan *good governance*.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian internal (Sembiring dalam Nurwati 2015). Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian internal dalam pemerintah daerah. Pengendalian internal dalam pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan internal yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Penelitian ini berfokus pada pengujian pengendalian internal untuk mendapatkan bukti empiris dalam menganalisis dan menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

B. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal* (Tricker, 1984). Sedangkan Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan

keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan organisasi serta fungsi pengendalian yang melakukan *ratifikasi* dan *monitoring* terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Lane (2000) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Sedangkan menurut Bastian (2003), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas dan segenap personal), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Kelemahan Pengendalian Internal

Menurut *Public Company accounting Oversight Board* (PCAOB) dalam Hartono (2014) menyatakan kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran pemerintah

Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik (Putri dan Mahmud, 2015).

Ukuran pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal, artinya pemerintah yang besar dan berpendapatan tinggi justru lebih banyak memiliki kelemahan pengendalian internal (Kristanto, 2009).

Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan perekonomian berupa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya (Martani dan Zaelani, 2011). Menurut Hartono (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan uraian diatas maka, hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. PAD secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011). Menurut Hartono (2015), PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena PAD (bersumber dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) secara leluasa dikelola oleh daerah, sehingga tidak terdapat kemungkinan penyelewangan pada dana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bentuk fisik lainnya (Kristanto, 2009). Menurut Halim (2014), pengelolaan belanja modal bukan hal yang mudah bagi seorang manajer di suatu entitas pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal merupakan bagian bentuk pengolahan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan asas keadilan. Permasalahan dalam kegiatan

belanja modal sering muncul pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap penatausahaan.

Berdasarkan landasan teoritis diatas, maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H₄: Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

C. METODE

Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel dependen: kelemahan pengendalian internal

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal. Definisi dari kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Kelemahan pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan kasus yang terdapat di badan pusat statistik.

Variabel independen

Ukuran Pemerintah

Ukuran merupakan sesuatu yang mencerminkan salah satu karakteristik dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. (Putri dan Mahmud, 2014)

$$\text{Ukuran} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pada penelitian ini PDRB diukur berdasarkan harga berlaku yaitu dengan:

$$\text{PE} = \frac{\text{PDRB}_{t1} - \text{PDRB}_{t0}}{\text{PDRB}_{t0}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat 1), yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

$$\text{PAD} = \text{Ln}(\text{HPD} + \text{HRD} + \text{HPKH} + \text{LPS})$$

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, kemudian aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah.

$$\text{BM} = \text{Ln}(\text{BMT} + \text{BMPM} + \text{BMGB} + \text{BMJIJ} + \text{BMFL})$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah semua kabupaten dan kota provinsi jawa tengah yang melaporkan secara rutin dan lengkap laporan necara, realisasi APBD, dan laporan produk regional bruto tahun anggaran 2013-2014.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian yang meliputi laporan keuangan dapat diperoleh dengan cara *download* melalui internet dari situs resmi diantaranya www.djpkdepkau.go.id, www.jatengbps.go.id, www.bpk.go.id selama tahun 2013-2014.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Model Regresi Linier Berganda Yang Terbentuk

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu dengan melihat pengaruh ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KPI = \alpha + \beta_1 U + \beta_2 PE + \beta_3 PAD + \beta_4 BM + e$$

Keterangan:

KPI = Kelemahan Pengendalian Internal

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

U = Ukuran

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

e = koefisien *error*

D. HASIL PENELITIAN

Tabel Proses Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2014.	70
Kabupaten dan kota yang tidak melaporkan secara rutin realisasai APBD tahun anggaran 2013-2014	(0)
Kabupaten dan kota yang tidak melaporkan secara lengkap realisasai APBD tahun anggaran 2013-2014	(0)
Kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian	70

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 60 data observasi yang berasal dari perkalian antara tahun penelitian (2 tahun; dari tahun 2013 sampai 2014) dengan jumlah kabupaten dan kota (70), namun ada data yang di outlier karena terdapat data yang tidak normal yang menyebabkan model tidak fit.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kelemahan SPI kabupaten dan kota Jawa Tengah dengan nilai terendah 5, nilai tertinggi 15, dan nilai rata-rata 10,93 dengan standar deviasi 2,185. Ukuran yang diproksikan dengan total aset kabupaten dan kota Jawa Tengah dengan nilai terendah 11,707, nilai tertinggi 15,773, dan nilai rata-rata 14,69758 dengan standar deviasi 0,586400. Pertumbuhan ekonomi kabupaten

dan kota Jawa Tengah dengan nilai terendah 6,319, nilai tertinggi 13,183, dan rata-rata 10,47310 dengan standar deviasi 1,059408. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota Jawa Tengah dengan nilai terendah 11,431, nilai tertinggi 13,739, dan nilai rata-rata 11,96330 dengan standar deviasi 0,441593. Belanja modal kabupaten dan kota Jawa Tengah dengan nilai terendah 11,145, nilai tertinggi 13,597, dan nilai rata-rata 12,27012 dengan standar deviasi 0,451092.

Uji Asumsi Klasik

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,103 dengan nilai signifikan sebesar 0,175. Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut adalah nilai signifikan $0,175 > 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan ukuran mempunyai nilai TV sebesar 0,835 dan VIF sebesar 1,197, pertumbuhan mempunyai nilai TV sebesar 0,851 dan VIF sebesar 1,175, PAD mempunyai TV sebesar 0,587 dan VIF sebesar 1,705, dan belanja modal mempunyai nilai TV sebesar 0,562 dan VIF sebesar 1,179. Variabel independen memiliki nilai *Tolerance Value (TV)* $> 0,10$ dan *Variabel Inflation Faktor (VIF)* < 10 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga model regresi tidak ada masalah multikolinieritas.

Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai *Runs-Test* sebesar 0,853 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai ukuran 0,309, nilai pertumbuhan 0,728, nilai PAD 0,690, dan nilai belanja modal 0,849. Masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi linier berganda yang terbentuk

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi linier berganda menghasilkan model sebagai berikut:

$$KPI = -12,398 + 0,059 U + 0,597 P + 0,513 PAD + 0,820 BM + e$$

Nilai konstan untuk persamaan regresi menunjukkan sebesar -12,398. Artinya jika ukuran, pertumbuhan, PAD, dan belanja modal dianggap konstan/tetap, maka jumlah kelemahan pengendalian internal akan menurun sebesar 12,398 kasus. Nilai koefisien ukuran pemerintah daerah sebesar +0,059 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan total aset, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 0,059 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan total aset, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,059 kasus. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi +0,597 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 0,597 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,597 kasus. Nilai koefisien PAD sebesar +0,513 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan PAD, akan berdampak pada kenaikan KPI sebesar 0,513 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan PAD, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,513 kasus. Nilai koefisien belanja modal sebesar +0,820 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan belanja modal, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 0,820 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan belanja modal, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,820 kasus.

Uji F

Hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 2,999$ lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,54 dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$ sehingga secara simultan ukuran, pertumbuhan daerah, PAD, belanja

modal berpengaruh terhadap variabel KPI. Model *fit* sehingga penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Uji R^2

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi linier berganda ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,119 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 11,9%, sedangkan 88,1% dijelaskan variabel-variabel lain di luar model.

Uji t

Variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai t_{hitung} (0,119) lebih kecil dari t_{tabel} sebesar (2,004) atau dapat dilihat dari nilai signifikan $0,906 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 ditolak, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai t_{hitung} (2,187) lebih besar dari t_{tabel} sebesar (2,004) atau dapat dilihat dari nilai signifikan $0,033 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Variabel pendapatan asli daerah mempunyai t_{hitung} (0,650) lebih kecil dari t_{tabel} sebesar (2,004) atau dapat dilihat dari nilai signifikan $0,518 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_3 ditolak, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Variabel belanja modal mempunyai t_{hitung} (0,169) lebih kecil dari t_{tabel} sebesar (2,004) atau dapat dilihat dari nilai signifikan $0,303 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_4 ditolak, artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

E. DISKUSI

Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kelemahan pengendalian internal

Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Mahmud (2014).

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya sudah baik. Pemerintah dalam hal ini berarti telah mampu berjalan sesuai dengan teori keagenan. Aset daerah pada hakikatnya adalah milik masyarakat, sehingga dalam teori keagenan masyarakat adalah *principal*. Pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan terhadap aset secara baik sesuai dengan kehendak rakyat, karena aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011).

Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak.

Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian internal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartono (2014).

Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki PAD yang lebih tinggi.

Pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristanto (2009).

Hasil ini menyatakan bahwa belanja modal tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya Pengendalian Internal. Sehingga penelitian ini tidak sesuai dengan Teori keagenan yang mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku principal akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerjanya, sehingga tujuan dari organisasi akan tercapai secara maksimal.

F. KESIMPULAN

Variabel yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel ukuran, pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: penelitian ini terbatas pada tahun penelitian yaitu hanya tahun 2013 dan 2014 sehingga hasil yang diperoleh belum banyak menjelaskan kondisi yang sesungguhnya karena jumlah populasi yang sedikit, dan penelitian ini hanya terfokus pada kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah saja sehingga hanya menggambarkan sebagian kecil dari sampel yang diteliti. Atas dasar keterbatasan tersebut di atas, maka bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode pengamatan yang lebih panjang. Penelitian selanjutnya sebaiknya wilayah penelitian diperluas lagi tidak terbatas pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- [1]Sembiring. 2009. "Fungsi dan Tugas Inspektorat dalam Pengendalian Intern Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatra Utara". *Journal Akuntansi dan manajemen Sumatra Utara*. Vol. 11 No. 1.
- [2]Nurwati, Ika. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal pemerintah Daerah". FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [3]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- [4]Martani, Dwi dan Zaelani, Fazri. 2011. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- [5]Tricker. 1984. *Corporate Governance-Paractices, Procedures and Power in British Companies and Their Board Of Dorectors*. Economist Books. ISBN 1-84668167-7.Uk, Gower.
- [6]Fama dan Jensen. 1983. The separation of ownersship and control. *Journal of law and economics*, 26, pp.

- [7] Lane. 2000. Jilid 1 (*Marketing Management, Twelfth Edition*). Terjemahan Benyamin Molan. Jakarta.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [9] Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Hartono, R, A. Mahmud dan N.S. Utaminingsih. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi XXVII*. 24-27 September 2014. Mataram. Lombok. Hal. 1-13.
- [11] Sumarjo, Hendro. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [12] Putri, Novi Kumala dan A, Mahmud. 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern PEMDA". *Accounting Analysis Journal* 4 (2) (2015). ISSN 2252-6765.
- [13] Kristanto, S. B."Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal". 2009. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*. Vol. 9. No. 1. ISSN: 1411-691X.
- [14] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [15] Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.